



Dampak Akibat Konstelasi Politik Elit Lokal Tradisional Donggo Bima Tahun 1972

Anwar¹, Subari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: anwardonggo8@gmail.com, subarisejarah@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-01 Keywords: <i>Impact; Political Constellation; Traditional Local.</i>	This research is a historical research using a descriptive qualitative approach which aims to examine the political constellation in the political arena in Bima Regency in 1972 between the rulers and the Donggo traditional elite. The research method is a historical method starting from heuristics, source criticism, verification, interpretation and historiography. The results of the study show that people's lives in general, we can see the social dynamics of the community are conducive and safe even though there are tensions that do not destroy the existing system. And the implementation of the celebration of democracy in political contestation is increasingly mature and always prioritizes deliberation and consensus to resolve any existing problems. Meanwhile, the economic life of the community is getting better due to the implementation of general infrastructure development, starting with roads, electricity, as well as agricultural and livestock facilities to support the needs of people's lives.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-01 Kata kunci: <i>Dampak; Konstelasi Politik; Lokal Tradisional.</i>	Penelitian ini merupakan penelitian sejarah (<i>histories research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji konstelasi politik dalam kancah perpolitik di Kabupaten Bima pada tahun 1972 antara penguasa dengan elit tradisional Donggo. Adapun metode penelitian ini adalah metode sejarah yang dimulai dari heuristic, kritik sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat secara umum kita bisa melihat dinamika sosial masyarakat kondusif dan aman sewalaupun ada ketegangan yang tidak meluluhlantahkan system yang ada. Dan terselenggaranya hajatan demokrasi dalam kontestasi poitik semakin dewasa dan selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat semakin baik akibat terlaksananya pembangunan infrastruktur umum dimulai fasilitas jalan, listrik, maupun fasilitas pertanian dan peternakan sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Peristiwa Donggo yang terjadi pada tahun 1972 merupakan rentetan peristiwa akibat kekecewaan anak bangsa. Masyarakat Donggo dihantui ketidakjelasan dan ketidakmenentuan akibat kondisi social yang terkontrol, sehingga menyebabkan komunitas itu merasa frustrasi yang sangat mendalam. Kodisi sosial yang semakin tertekan ditambah dengan gejala kemiskinan yang kian akut, memicu kemarahan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tradisional. Politik pemigiran dan diskriminasi pembangunan yang dilakukan oleh Soeharmadji yang menjabat sebagai Bupati Bima periode (1969-1974) adalah mencederai demokrasi yang dibangun berasaskan pancasila. Politik pemigiran dan diskriminasi itu dilakukan terhadap lawan politik yang bertentangan dengan kepentingan rezim. Intimidasi dan intervensi kepada masyarakat diarahkan untuk mengikuti kehendak rezim dilakukan oleh TNI/Polri kian massif. Pada

saat yang sama rezim Soeharmadji menjalankan system politik totaliter dengan menggunakan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai penyongkong kebijakan politiknya. Hal lain juga terjadi hegemoni dan militeristik di sertai dengan tindakan kekerasan mejadi langkah jitu untuk membungkam aspirasi politik masyarakat. Hal itu menjadi momok akibat rekayasa politik dimainkan rezim yang berkuasa semakin gencar, sehingga dapat menyebabkan keresahan bagi masyarkat (Rangga R, 2011).

Diskursus politik dihantui oleh ketidakjelasan itu diwarnai oleh perlawanan masyarakat yang termarginalkan oleh janji politik Soeharmadji untuk membangun fasilitas umum di Kecamatan Donggo. Perlawanan itu dilakukan dalam bentuk protes masa yang di motori oleh organisasi kemahasiswaan yang bernama Ikatan Mahasiswa Donggo Bima (IKMDB). Mereka hadir menuntu untuk meneriakan kebenaran ditengah kebijakan politik rezim memiliki tingkat ketidakpastian dan

cacat hukum. Janji politik yang dibangun bersama masyarakat tak kunjung datang, lima tokoh-tokoh Donggo bersama masyarakat tradisional melakukan demonstran untuk turun di jalan menuntut kepada kepada rezim Pemerintah Kab. Bima untuk segera membangun infratraktur umum di Kecamatan Donggo. Protes masa lahir atas dasar kekecewaan masyarakat yang sebagian besar petani itu, melakukan tindakan yang memiliki resiko tinggi. Atas nama "*Ladjna Amar Makruf Nahir Mungkar*" dan demi menuntut sebuah keadilan serta demi kedamaian masa depan, maka beban moral dan pikiran bahkan jiwa dan raga sekalipun mereka korbankan. Atas dasar sebuah keyakinan untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini yang penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat. Kemudian rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru atau ideologi baru dengan menciptakan keadaan baru guna terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian itu gerakan social masyarakat Donggo dilakukan dalam bentuk protes masa yang dikendalikan oleh lima orang tokoh berpengaruh dalam menggalang aksi. Antara lain Abas Oya aktivis mahasiswa Universitas Mustopo tampil mewakili anak muda, Jamaludin Yasin dan M.Ali Ta'amin representase elit-elit tradiesional desa, Abdul Majid Bakri mewakili ulama dan H.Kako Bongko dinobatkan sebagai tokoh kebatinan/mistik lokal. Kolaborasi kelima tokoh sebagai tokoh sentral mampu meng sugestasi masa dengan cara yang berbeda dalam mendesain aksi lewat unsure-unsur tradisional. Spirit dalam membangkitkan semangat perjuangan merikat pada setiap masyarakat untuk menyatukan ide dan gagasan terbangun atas dasar solidaritas ke-Donggo-an (Aksan, 2020). Semangat perjuangan dengan doktrin kemunafikan yang digaungkan oleh actor penggerak, akhirnya massa turun ke jalan (*long march*) menuju Kantor Bupati Bima pada tanggal 22 Juni 1972. Masa berdatangan dari desa-desa berjalan kaki dengan membawa spanduk yang berisi beberapa poin tuntutan untuk ditunjukkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima antara lain 1), Mengkritik sistem pemerintah kabupaten Bima yang otoriter diubah menjadi sistem demokrasi, 2), Pembedaan kedholiman dengan perlakuan ABRI yang sewenang-wenang, 3) Menuntut pemerataan pembangunan di Kabupaten Bima lebih khususnya di Kecamatan Donggo yang belum tersentuh oleh pembangunan (Gazali Ama La Nora

& Mustahim, 2017). Tulisan ini menjelaskan dampak social, politik dan ekonomi akibat konstelasi politik antara tokoh lokal Donggo dengan Pemerintah Kabupaten Bima.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian sejarah (*historisc research*) yang meliputi heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristic adalah tahap untuk melakukan pengumpulan data atau sumber berupa kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi.
2. Kritik dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh melalui kajian pustaka, wawancara, dan documenter. Data sejarah diuji validitas dan kredibilitas keasliannya, dan setiap sumber memiliki dua cirri kritik baik internal maupun eksternal. Menurut Notosusanto (1971:20) bahwa setiap sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern. Aspek eksternnya berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu memang betul sumber, artinya sumber otentik yang dibutuhkan oleh penulis.
3. Interpretasi dilakukan untuk menganalisa dan mensintesis data terhadap fakta sejarah yang sudah diseleksi melalui kritik sumber dengan ketelitian dan kehati-hatian agar terhindar dari imajinasi kata dan tetap mengacu pada fakta data sumber sejarah yang ada. Interpretasi bertujuan untuk memberikan makna dari data yang diperoleh dengan menggunakan data teoritis dan konsep yang digunakan dalam penelitian dan selanjutnya menyusun fakta-fakta yang menjadi sebuah tulisan. Dalam Gottschalk (1986:28) menyatakan fakta-fakta merupakan perwakilan dari pada sesuatu yang pernah nyata ada, tetapi fakta ini tidak memiliki kenyataan objektif sendiri.
4. Historiografi merupakan tahap akhir dari sebuah rangkaian penulisan sejarah dengan mengacu pada tahapan heuristic, kritik, dan interpretasi. Tahap ini berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi sehingga dapat mengisahkan tentang peristiwa sejarah secara kronologis. Sjamsudin (2012:121), menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dalam rangka memahami sejarah.
5. Sedangkan Historiografi menurut Abdullah (1985:15), merupakan puncak dari segalanya, sebab apa yang dituliskan oleh sejarawan itulah sejarah yang *histoire recite*, sejarah

sebagaimana yang dikisahkan. Yang mencoba mengungkapkan dan memahami *histoire realite*, sejarah sebagaimana yang terjadi dan hasil penulisan inilah yang disebut dengan historiografi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang politik dalam rangka menuju kebebasan berekspresi agar masyarakat melakukan refleksi mendalam tentang keadaan masa lalu dan mencoba untuk membayangkan kehidupan masa depan. Cukup fair mengatakan bahwa konstruksi politik yang dibangun di Bumi "*Maja Labo Dahu*" semboyan Pemerintah Kabupaten Bima tidak terlepas dari terjadinya pergolakan antara rezim Soeharmadji dengan kaum tani. Disatu sisi pihak penguasa ingin membangun kebijakan politik agar terlepas dari pengawasan dan pengontrol dari masyarakat. Disisi lain masyarakat ingin bangkit dari diskriminasi dan politik peminggiran menuntut hak yang samabagi warga Negara. Dou Donggo atau orang Donggo adalah representasi dari anak bangsa tampil memperjuangkan kepentingan bersama, dimana kondisi social, politik dan ekonomi diperhadapkan dengan ragam masalah. Persaolan muncul datang silih berganti akibat protes dan gerakan masa sering menimbulkan berbagai gejolak, sehingga mengguncangkan stabilitas politik di Bima. Pengawasan politik yang demikian gencar dilakukan oleh rezim penguasa, sehingga merorong tatanan masyarakat tradisional. Diskursus dalam konstelasi politik antara penguasa Bima dengan elit tradisional desa menimbulkan gejala yang berdampak pada kehidupan social, politik dan ekonomi masyarakat Donggo.

1. Dampak Sosial

Dalam kehidupan sosial masyarakat Donggo diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang demikian mencekam. Kondisi social yang demikian itu diperparah oleh operasi penangkapan orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi. Operasi koter yang dilakukan oleh TNI/Polri dengan latihan menembak pohon-pohon dan letusan mortar dipertontonkan dihadapan para masyarakat. Pertunjukan itu mengisaratkan bahwa inilah kekuatan yang dimiliki oleh rezim untuk tidak mencoba mengganggu kekuasaannya. Rasa ketakutan akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh TNI/Polri menimbulkan rasa frustrasi bagi masyarakat akibat dipaksa untuk mengakui siapa dalang dari peristiwa itu. Perlakuan ABRI dengan kaki tangannya

menyeret masyarakat di tempat-tempat terbuka, mereka ditodong dengan pistol dan senjata laras panjang. Pelecehan seksual terjadi pada kaum perempuan dan gadi-gadis, harta benda dirampas, serta hewan peliharaan masyarakat di potong untuk disantap bersama TNI/Polri. Ancaman untuk membunuh masyarakat Donggo yang didung-dung oleh TNI/Polri dan rasa ketakutan yang mendalam itu, masyarakat lari dan bersembunyi di hutan-hutan belantaran di wilayah Donggo dan juga sebagiannya lari ke desa-desa yang ada di Kabupaten Dompu yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Donggo.

Selanjutnya dampak lain dari koopotasi itu dapat dilihat dalam bentuk hubungan sosial sesama warga masyarakat Donggo sangat baik dan antara warga dengan masyarakat pendatang sangat harmonis. Disamping itu, masyarakat masih bertahan pada tradisi lama, dimana persoalan muncul baik internal maupun eksternal dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan aturan dan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat itu sendiri. Hal lain juga dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kekerabatan dan kekeluargaan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam system sosial masyarakat Donggo masih berpegang teguh nilai-nilai sosial, kepedulian sesama warga dapat dipenuhi dalam bentuk gotong royong dan kerjasama. Disisi lain sistem kekeluargaan dibangun atas kebersamaan masyarakat, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan dapat diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan. Jika hal demikian tidak dapat diselesaikan oleh sesama kekeluargaan dan adat istiadat, maka akan dilakukan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sistem kekeluargaan dan kebersamaan adalah warna baru dalam kehidupan social masyarakat Donggo, sehingga persoalan muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Disisi satu sisi, nilai budaya yang melekat pada masyarakat dikembangkan secara turun terus menerus dalam kehidupan social, seperti nilai sopan santun, tata karma, menghormati dan menghargai, adat istiadat, normal hukum merupakan identitas tersendiri oleh masyarakat Donggo yang memiliki ragam multikultur. Dengan demikian disisi lain juga masyarakat yang kaya akan ragam budayapluralism agama, karena diwilayah itu terdapat dua

agama besar antara islam dan Kristen hidup dalam kehidupan yang harmonis sesama warga Negara. Dalam kerukunan beragama nuansa toleransi melekat pada masyarakat yang memiliki multi agama. Sehingga perbedaan agama yang dianut tidak menjadikan masyarakat dalam lintas kultur merasa terpinggirkan dengan budaya lain. Toleransi antar umat beragama menjadi kekayaan tersendiri dalam kehidupan social budaya masyarakat Donggo. Dengan multikultur tersebut merupakan pendukung pembangunan masyarakat yang ideologis, agamais, dan pluralis agar tidak terjadi ketegangan dalam kehidupan umat beragama. Kesejukan dan kedamaian dalam menyiarkan agama masing-masing tercipta dalam bentuk kerjasama lintas tokoh baik ulama maupun rohaniwan gereja. Masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dengan relasi kekeluargaan yang akut serta menghargai antar sesama merupakan filosofi masyarakat Donggo.

2. Dampak Politik

Ketegangan politik diantara elit lokal dengan tokoh tradisional menyebabkan terganggunya stabilitas di Bima yang tidak bisa di asingkan sehingga telah menimbulkan kegelisahan yang meluas dikalangan masyarakatnya. Kegelisahan itu bila dikomunikasikan akan memberikan pengaruh dalam kehidupan politik tokoh-tokoh Donggo yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hegemoni elit dengan tokoh lokal tradisional Donggo ikut berperan dalam mengambil kebijakan politik bersama Pemerintah Kabupaten Bima. Sikap kritis elit tradisional dalam ketertindasan waktu itu telah memberikan dampak yang signifikan dalam proses pembangunan di Kecamatan Donggo. Setelah naiknya tokoh-tokoh yang terlibat dalam gejolak social menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima ikut memperjuangkan kepentingan rakyat. Kehidupan politik setelah duduknya tokoh-tokoh Donggo di kursi DPRD Kabupaten Bima umumnya stabil, dan ikut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Pemerataan pembanguana, perputaran ekonomi dan perencanaan sudah mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Donggo. Memperjuangkan kebutuhan lewat benturan fisik mulai ditinggalkan, kini aspirasi politik tersampaikan oleh anggota DPRD lewat partai politik sebagai perpanjangan tangan masyarakat.

Perjuangan lewat partai politik terlihat dinamis dan tidak terjadi ketegangan yang menyebabkan terganggunya struktur sosial, walaupun ada sedikit tarik menarik terhadap perbedaan pendapat, akan tetapi tidak meluhlantahkan system politik yang ada. Kedewasaan politik sangat dibutuhkan dalam system demokrasi, hal itu menjadi sebuah langkah menuju kearah konsolidasi politik yang dilakukan oleh elit politik dalam menjunjung tinggi kebijakan dan legitimasi hokum yang dibangun berdasarkan asas pancasila. Perkembangan politik masyarakat Donggo tersalurkan melalui tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa demonstrate duduk di kursi dewan antara lain, Abas Oya, Jamaludin Yasin dan Abdul Majid Bakri. Tiga tokoh itu menjabat sebagai anggota DPRD utusan partai Golkar (golongan karya) selama dua periode, sedangkan M.Ali Ta,amin dan H. Kako Bongko dipercaya sebagai kontraktor. Melalui anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Donggo, pembangunan mulai terlihat dengan membangun infrastruktur jalan lintas Donggo yang dimulai arah Desa Tumpu Kecamatan Bolo sampai Desa O,o dan dibangunnya jalan penghubung desa-desa yang ada di Kecamatan Donggo. Disamping itu, melalui anggota dewan itu pemerintah membuka lahan pertanian dan peternakan sebagai penunjang kehidupan masyarakat yang mandiri.

Implikasi dari kondisi social politik yang demikian itu, ikut mengubah tatanan perpolitikan pasca kontelasi politik lokal. Pada saat yang sama situasi dan kondisi yang kian akut menjadi sebuah langkan pencapaian untuk mengubah kehidupan social politik kearah yang lebih baik. Suksesnya penyelenggaraan demokrasi baik lokal maupun nasional relative aman, artinya masyarakat Donggo dewasa dalam berpolitik. Dan oleh karena itu, proses panjang menuntut kesejajaran yang sama dalam pembangunan dapat dipahami oleh gerakan social yang dilakukan masyarakat Donggo. Kebangkitan kembali komunitas ini, setelah infrastruktur masuk di desa-desa, meskipun laju pembangunan tidak sama dengan kecamatan lain. Akan tetapi hal itu cukup menjadikan masyarakat Donggo bagian terintegral secara social-kultur dengan masyarakat lain di Kabupaten Bima.

3. Dampak Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi pasca peristiwa itu dapat memberikan pengaruh yang sig-

nifikan dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Setelah sarana dan prasarana umum masuk di desa-desa di Kecamatan Donggo, masyarakat mulai melakukan kegiatan ekonominya. Upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, pemerintah bersama anggota dewan utusan Donggo membuka hutan tutupan yang ada di lembah Desa Punti, Desa Kala, Desa Bajo, Desa Doridunga, Desa O,O, dan Desa Mbawa. Pembukaan lahan itu, dikarenakan memiliki garis datar dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Dengan dilakukan pembukaan lahan pertanian, pemerintah memberikan bantuan bibit padi padi, kedelai dan jagung pada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan pokok akan sandang dan pangan. Selanjutnya pemerintah memberikan bibit hewan ternak berupa sapi dan kerbau agar masyarakat mampu menyesuaikan kehidupan yang lebih layak. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dalam bentuk penjualan produksi tani dan peternakan, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai pelaku konsumsi tetapi juga masyarakat yang produktif. Dibangunnya fasilitas yang memadai, kehidupan ekonomi masyarakat meningkat dan dapat menunjang kebutuhan sehari-hari. Dengan ragam mata pencahariannya yang tidak hanya berprofesi sebagai petani dan peternakan, namun juga masyarakat Donggo membuka diri dengan profesi menjadi PNS (pegawai negeri sipil), TNI/Polri, Pegawai swasta, buruh dan juga sebagai wartawan. Peningkatan ekonomi masyarakat bagian dari terlaksananya pembangunan infrastruktur umum dimulai fasilitas jalan, listrik, maupun kantor-kantor sebagai penunjang arus perputaran ekonomi masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan yang ditemukan dalam tulisan ini bahwa konstelasi politik antara rezim pemerintahan Kabupaten Bima dengan elit lokal tradisional di Donggo memberikan dampak yang cukup signifikan di bidang sosial, ekonomi dan politik. bahwa dampak kehidupan sosial masyarakat Donggo akibat intimidasi yang struktur oleh rezim pemerintah bersama kaki tangannya disatu sisi sehingga menyebabkan mereka merasa frustrasi dan trauma mendalam. Disisi lain sistem kekeluargaan dibangun atas keber-

samaan masyarakat, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan dapat diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan. Sedangkan dalam kehidupan politik masyarakat Donggo tersalurkan melalui tokoh-tokoh Donggo yang terlibat dalam gerakan sosial duduk di kursi legislative DPRD selama dua periode. Melalui anggota DPRD utusan Donggo, aspirasi politik masyarakat tersampaikan dengan membangun fasilitas umum seperti yang menjadi tuntutan masyarakat selama ini. Selanjutnya dalam kehidupan ekonomi seiring dengan meningkatnya pembangunan yang memadai, masyarakat mulai mengubah wajah untuk menata kehidupannya yang lebih baik. Masyarakat Donggo mempunyai ragam mata pencaharian yang bukan hanya focus pada pertanian dan peternakan melainkan juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik Guru, Kantor, dan TNI/Polri maupun ada juga sebagai, karyawan swasta, dan buruh tani.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Dampak Akibat Konstelasi Politik Elit Local Tradisional Donggo Bima Tahun 1972.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksa, 2020. *Dou Donggo Menggugat: Sebuah Gejolak Sosial di Bima Era Orde Baru*. Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 18 No. 1 (2020): 132-145 ISSN: 1412-5870.
- Budiman, Arief, 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali A. Nora, 2008, *Outobiografi Mutiara Donggo*. NCI Press, Jakarta Barat.
- Ghazali A. Nora, H. Mustaim, 2017. *Peristiwa Donggo: Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Mataram: PT. Suara Niaga Nusantara (Lombok Post Group).
- Gottschalk, Louis. 1995. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press

- Hamzah, Muslimin, 2000. *Dou Donggo Majalah Progress, Edisi III*. Jakarta: PT. Yayasan Lamangge Media.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mustahid H. Kako,. 2013. *Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan dan Hukuman Semasa Orde Baru*. Mataram: Lombok Post.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam.
- Oman, Sukmana, 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Rangga.R, 2011. *Gerakan Sosial Masyarakat Donggo 1972: Kisah Elit-elit yang Terkalahkan*. Skripsi: Universitas Negeri Malang
- Sjamsudin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yusron, 2009. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di tengah Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.